

Implementasi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) Bertajuk “Ayo Sekolah Rek” di Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

Vaizal Baihakqi, Tjijik Rahaju

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 30, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 02, 2025

Keywords

Implementation, Programs ATS, Quality
Education

Keywords:

Implementasi, Program ATS, Kualitas
Pendidikan



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRACT

Quality of education and reduce the dropout rate in Indonesia. Although it has been running, the ideal of education for all has not been achieved. Based on the Regent's Decree Number 188.45/422/HK/416-012/2023, Sidoharjo Village, Gedeg District, Mojokerto Regency was appointed as one of 8 P-ATS pilot projects. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, interviews, documentation, and literature studies. The analysis was carried out based on the Van Meter and Van Horn policy implementation theory which includes six indicators: policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementers, environment, and implementer disposition. The results of the study indicate that the program standards and objectives are running well and are able to motivate children to return to school. Human resources work according to SOP. However, education to the community is still lacking so that there is a need to increase socialization. The disposition of the implementers is quite good, while communication between organizations needs to be improved even though the budget is limited. The economic, social, and political environment is quite supportive. The researcher suggests that

the Mojokerto Regency Government be more active in socializing the program and paying attention to the budget and supporting facilities for P-ATS.

ABSTRAK

Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) merupakan inisiatif UNICEF untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menurunkan angka putus sekolah di Indonesia. Meski telah berjalan, cita-cita pendidikan untuk semua belum tercapai. Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/422/HK/416-012/2023, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto ditunjuk sebagai salah satu dari 8 pilot project P-ATS. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis dilakukan berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam indikator: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, lingkungan, dan disposisi implementator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan tujuan program berjalan baik dan mampu memotivasi anak kembali bersekolah. Sumber daya manusia bekerja sesuai SOP. Namun, edukasi kepada masyarakat masih kurang sehingga perlu peningkatan sosialisasi. Disposisi pelaksana cukup baik, sementara komunikasi antarorganisasi perlu ditingkatkan meski anggaran terbatas. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik cukup mendukung. Peneliti menyarankan agar Pemkab Mojokerto lebih aktif mensosialisasikan program serta memperhatikan anggaran dan fasilitas pendukung P-ATS.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek fundamental yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan maka seseorang dapat memperoleh ilmu pengetahuan, baik itu melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal (Hamdani et al., 2022). Pendidikan memiliki andil dalam kemajuan suatu negara dalam mengembangkan pemikiran sumber daya manusia. Menurut Undang-Undang 1945, yang menegaskan bahwa negara harus “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”, pernyataan tersebut didukung juga melalui Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak”. Program wajib belajar yang dilaksanakan oleh pemerintah

sejak tahun 1994 menjadi langkah awal demi mencapai tujuan yang diinginkan yaitu untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Melalui program ini mewajibkan seluruh anak dapat melaksanakan pendidikan di Indonesia selama 6 tahun (usia 7-12 tahun), kemudian diperluas menjadi 9 tahun (usia 7-15 tahun), dan berubah sejak tahun 2015 ditingkatkan menjadi 12 tahun (usia 7-18 tahun) (Purwatiningsih & Suprojo, 2024).

Menurut Taufik dan Rahaju (2021) dalam penelitiannya mendefinisikan pendidikan adalah faktor penentu dalam mencapai keberhasilan bangsa dan generasi penerus bangsa akan menjadi semakin optimal apabila sistem pendidikan yang diterapkan juga baik. pendidikan yang baik dilaksanakan pemerintah melalui program wajib belajar. Program wajib belajar dilaksanakan minimal meliputi SD hingga jenjang SMA. Namun hingga saat ini, di Indonesia hingga saat ini masih belum mampu mewujudkan salah satu cita-citanya, yaitu pendidikan bagi semua orang dan juga di Indonesia masih banyaknya angka putus sekolah. Fenomena anak putus sekolah yang masih banyak terjadi merupakan permasalahan yang masih kompleks, berdasarkan data kemendikbudristek 4,6 juta anak. Menjalani kehidupan sebagai anak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan tentu menjadi pengalaman yang penuh tantangan.

Kondisi ini secara tidak langsung membuat mereka akan kehilangan masa depan yang pasti. Angka putus sekolah menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. (Ridwan et al.,2022). Berikut merupakan data angka anak putus sekolah di Indonesia

Tabel 1. Data Anak Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan SD-SMA

Tahun	SD	SMP	SMA
2020	0,11%	1,04%	1,13%
2021	0,12%	0,90%	1,12%
2022	0,13%	1,06%	1,38%
2023	0,11%	0,98%	1,03%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pada tabel 1 menunjukkan angka putus sekolah di Indonesia masih tinggi, mencerminkan tantangan besar dalam pemerataan akses pendidikan. Pada 2022, tingkat putus sekolah di jenjang SD mencapai 0,13%, naik 0,01 poin dari tahun sebelumnya. Di jenjang SMP sebesar 1,06% (naik 0,16 poin), dan SMA sebesar 1,38% (naik 0,26 poin), tertinggi di antara semua jenjang. Ini berarti 13 dari 1.000 siswa putus sekolah di SMA. Namun, pada 2023 terjadi penurunan di semua jenjang, mengindikasikan perbaikan berkat upaya pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan akses pendidikan dan program intervensi yang lebih tepat sasaran.

Di Indonesia, anak putus sekolah dipengaruhi oleh terbatasnya akses ke fasilitas pendidikan yang aman, kondisi ekonomi lemah, minimnya perhatian orang tua, rendahnya minat belajar, dan infrastruktur yang kurang memadai (Maghfirah, 2019). Kurangnya pengawasan juga meningkatkan risiko pergaulan negatif. Situasi ini perlu perhatian serius dari pemerintah karena berdampak besar pada masa depan generasi muda dan pembangunan SDM. Untuk mengatasinya, pemerintah bekerja sama dengan UNICEF dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menekan angka putus sekolah. Oleh karena itu UNICEF hadir dalam program PATS dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia. Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi anak yang mengalami putus sekolah, salah satu upaya yang diambil oleh pemerintah dalam menangani fenomena anak putus sekolah yakni melalui Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia. Stranas ATS merupakan kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas, UNICEF, serta berbagai kementerian dan lembaga lainnya, strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) diwujudkan melalui Program P-ATS, dengan Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu pilot project UNICEF. Program ini dilaksanakan karena tingginya angka putus sekolah, tercatat 4.626 anak pada tahun ajaran 2024/2025 (radarmojokerto.jawapos.com).

Meski UMK Mojokerto cukup tinggi, yaitu Rp 4.856.026 pada 2025, masih banyak anak tidak sekolah akibat faktor lingkungan, ekonomi, dan sosial yang melemahkan motivasi belajar. Program P-ATS bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Mojokerto, agar peluang kerja dan pendapatan masyarakat ikut meningkat. UNICEF menetapkan 8 desa sasaran di Mojokerto, salah satunya berada di Kecamatan Gedeg yang memiliki angka anak putus sekolah yang masih banyak. Berikut disajikan data setiap desa di Kecamatan Gedeg terkait angka anak yang mengalami putus sekolah.

Tabel 2. Data Anak Putus Sekolah setiap desa di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

Desa	Jumlah Anak Putus Sekolah
Terusan	38
Sidoharjo	29
Balongsari	4
Bandung	14

Batankrajan	7
Gembongan	11
Gempolkerep	12
Jeruk seger	10
Kemantren	8
Pagerjo	6
Pagerluyung	10

Sumber: Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), 2023/2024

Desa Terusan mencatat angka putus sekolah tertinggi (38 kasus), disusul Sidoharjo (29 kasus) dan Pagerluyung (20 kasus). Balongsari memiliki angka terendah dengan 4 kasus. Desa lainnya menunjukkan variasi angka, mencerminkan tantangan pendidikan di tiap desa Kabupaten Mojokerto. Data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk merancang program intervensi terfokus guna mengembalikan anak putus sekolah ke bangku pendidikan, seperti yang telah diterapkan di Desa Sidoharjo.

Melalui Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/422/HK/416-012/2023, pemerintah mereplikasi program P-ATS sebagai langkah strategis menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) 2023–2026. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas SDM dengan menyediakan akses pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Realisasi program P-ATS di Kabupaten Mojokerto mendapat apresiasi dari Kepala Perwakilan UNICEF Jawa, Tubagus Arie Rukmantara, atas langkah cepat pemerintah daerah melalui pendataan berbasis SIPBM, penyusunan rencana aksi, dan pengembalian ATS ke pendidikan. Program ini menjangkau delapan desa, dengan Desa Sidoharjo sebagai percontohan. Berdasarkan Perdes Nomor 2 Tahun 2024, sejak akhir September 2023, beberapa anak mulai mengikuti pendidikan non-formal melalui PKBM. Namun program yang di lanjutkan pemerintah masih terdapat tantangan yang terjadi sehingga menghambat program yang menyebabkan belum optimal. Seperti hal nya pernyataan yang disampaikan langsung oleh Bapak Candra selaku tim penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Mojokerto, yang menyatakan bahwa: “Program Penanganan P-ATS ini tidak seviral seperti stunting maupun kemiskinan, sehingga masih terdapat perangkat desa ataupun instansi yang menganggap program ini biasa saja, padahal di 8 Desa yang menjadi pilot ditemukan ATS yang masih banyak” (wawancara 21 November 2024).

Selain itu juga Mas candra selaku tim penanganan menambahkan kurang optimalnya program ini juga dipengaruhi dari komunikasi antar desa dan juga tim pelaksana, beliau mengatakan:

“Masih minimnya koordinasi lintas sektor mas,dalam penanganan ATS itu komitmen dari instansi yang terlibat kurang optimal dalam mengembalikan anak putus sekolah, perlu adanya inovasi, agar mereka lebih semangat untuk kembali bersekolah”(Wawancara 21 November 2024)

Pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi program. Hal ini disampaikan oleh Bapak Candra, tim penanganan ATS Kabupaten Mojokerto, yang menyoroti kendala di lapangan sebagai faktor utama belum maksimalnya hasil program. Dalam wawancara awal, Bapak Khoirul selaku Sekretaris Desa Sidoharjo menyampaikan bahwa beberapa anak telah melanjutkan pendidikan melalui jalur non-formal seperti kejar paket dan MBKM. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi kendala yang menghambat optimalisasi.

Program P-ATS merupakan tanggung jawab bersama dalam memenuhi hak anak atas pendidikan. Program ini perlu pemantauan rutin berbasis data untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan. Tingginya angka putus sekolah juga berdampak pada cita-cita Indonesia Emas 2045. Di era globalisasi, SDM berkualitas sangat dibutuhkan. Dengan demikian, judul pada penelitian ini adalah "Implementasi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) Bertajuk “Ayo Sekolah Rek” di Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program dalam upaya untuk mengembalikan anak mau kembali mengenyam pendidikan.

METODE

Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:9) dalam Sianturi, (2020). Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti sebagai instrumen yang penting, dalam teknik pengumpulan data yaitu dilakukan secara triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi sehingga akan memahami implementasi program penanganan anak putus sekolah di Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi literatur, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini berada di Desa Sidoharjo Kecamatan gedeg, selain itu, peneliti mengambil lokasi pada Desa Sidoharjo karena merupakan salah satu dari 8 desa yang menjadi pilot proyek.

Adapun fokus penelitian ini adalah implementasi program penanganan anak putus sekolah (P-ATS), yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van horn (dalam Kasmad, 2018) dengan enam indikator yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik agen pelaksana. Disposisi implementator, komunikasi antar organisasi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Subjek penelitian ini didapatkan melalui *purposive sampling*, diantaranya Bapak candra selaku pegawai dinas Bappeda dan juga tim penanganan ATS, Bapak Purnomo selaku kepala di Desa Sidoharjo, Ibu liswati selaku dinas pendidikan dan juga para staf pegawai Desa Sidoharjo.

Sumber data pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder yang didapatkan secara langsung di lapangan dan data sekunder sebagai data pendukung peneliti. Teknik analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman (1992) meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program penanganan anak putus sekolah (P-ATS) merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto bersama dengan UNICEF dalam upaya mengurangi angka anak putus sekolah dan mengembalikan anak untuk mengenyam pendidikan guna meningkatkan kualitas dan pemikiran yang lebih baik.

Implementasi program P-ATS, peneliti mengkaji dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator dalam menganalisis implementasi kebijakan yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementator, komunikasi antar organisasi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, berikut mengenai indikatornya adalah sebagai berikut:

Standard dan Tujuan Kebijakan

Standard dan tujuan kebijakan sangat memengaruhi keberhasilan suatu kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, standar kebijakan diukur melalui efektivitas, efisiensi, dan kecukupan, yang berkaitan erat dengan tujuan akhir kebijakan. Hoogerwert (2020) menyebut standar dan tujuan kebijakan sebagai ukuran untuk menilai hasil serta sasaran yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Di Kabupaten Mojokerto, implementasi kebijakan dimulai dengan menetapkan tujuan, yakni mengurangi jumlah anak tidak sekolah melalui Program PATS untuk mendukung terwujudnya generasi emas 2045.

Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah di Indonesia, dengan harapan dapat mengurangi jumlah anak yang tidak bersekolah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memperbaiki kualitas pendidikan dengan menurunkan angka anak tidak sekolah hingga mencapai target nol pada tahun 2045. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Liswati selaku tim bidang kesetaraan di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto bahwa,

“Tujuan awalnya itu untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, jika angka partisipasi tinggi maka angka ATS akan rendah, begitupun sebaliknya. Otomatis kualitas generasi bangsa indonesia lebih terstandarisasi menuju generasi emas 2045. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk angka ATS jadi 0 target di 2045 Mas.” (Wawancara pada tanggal 5 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB)

Program ini bertujuan untuk membantu anak-anak yang putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikan formal, sesuai dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun dari pemerintah. Selain tujuan program, terdapat beberapa manfaat dari adanya program ini diantaranya, program P-ATS dapat mengidentifikasi jumlah dan penyebab anak tidak sekolah di setiap desa, sehingga pemerintah dapat merencanakan tindakan yang lebih tepat dalam mengatasi masalah tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Mas Candra selaku tim P-ATS bahwa,

“Manfaat program P-ATS untuk Kabupaten Mojokerto dapat meningkatkan data ATS seperti jumlah dan penyebab dari anak tidak sekolah yang terjadi di setiap Desa. Sehingga pemerintah dapat merencanakan daerah yang sesuai serta anak tidak sekolah mau sekolah lagi.” (Wawancara pada tanggal 21 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB)

Program ini tidak hanya meningkatkan partisipasi sekolah tetapi juga mendukung pemerataan pendidikan di daerah-daerah. Mengingat pendidikan sangat penting bagi seluruh masyarakat dan pentingnya pendidikan telah diatur dalam UUD 1945. Sehingga harapannya program P-ATS ini dapat mengembalikan anak yang drop out atau anak tidak sekolah dapat kembali bersekolah agar kedepannya memiliki kehidupan yang layak dan sejahtera. Hal tersebut disampaikan pada saat rapat dengan aparat

desa juga masyarakat terkait program ATS. Berikut gambaran aparat desa saat diskusi bersama masyarakat.

Gambar 1. Pertemuan Aparat Desa dengan Masyarakat Membahas Program ATS



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2025

Manfaat program PATS turut dirasakan oleh masyarakat dan anak-anak seperti, anak ATS merasa lebih termotivasi untuk belajar dan mendapatkan ijazah yang setara dengan pendidikan formal lainnya. memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui pendidikan formal. Seperti yang disampaikan oleh Wirangga selaku anak tidak sekolah yang mengikuti program P-ATS mengatakan bahwa,

“Program P-ATS ini cukup baik Mas, saya jadi merasa terbantu dengan adanya kegiatan ini. Saya terus bersemangat untuk belajar dan akhirnya berhasil mendapat ijazah.” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2025 Pukul 19.00 WIB)

Namun, meskipun banyak manfaat yang dirasakan masih terdapat beberapa kekhawatiran dari orang tua, yaitu merasa kurang memahami manfaat yang akan diperoleh anak, serta kejelasan apakah semua siswa yang mengikuti program ini dijamin lulus. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ngatiyar selaku orang tua ATS mengungkapkan bahwa,

“Saya tau Mas program P-ATS ini tujuannya untuk membantu anak yang tidak sekolah agar mau sekolah tetapi saya kurang memahami benefit dari program ini seperti apa, apakah semua siswa yang mengikuti program ini akan lulus semua. Karena masih terdapat anak yang tidak mau sekolah.” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2025 Pukul 19.00 WIB)

Berdasarkan tanggapan dari Ibu Ngatiyar masih terdapat anak yang tidak mau mengikuti program ini, dan beliau kurang memahami benefit yang akan diperoleh anak, seperti apakah semua anak akan dijamin lulus dan mendapatkan ijazah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan sosialisasi yang lebih efektif serta evaluasi berkala untuk memastikan bahwa tujuan dan kebijakan program dapat tercapai dengan maksimal.

Sumber Daya Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa setiap tahap implementasi menuntut sumber daya berkualitas. George C. Edward III (2020) juga menekankan bahwa keberhasilan kebijakan bergantung pada ketersediaan dan kualitas sumber daya pendukung. Widodo (2019) menambahkan bahwa infrastruktur dan sumber daya yang memadai sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan.

Salah satu variabel utama dalam keberhasilan kebijakan adalah sumber daya, yang mencakup sumber daya manusia, finansial, sarana-prasarana, dan waktu. Pemerintah Kabupaten Mojokerto bersama tim PATS telah melaksanakan perencanaan dengan dukungan keempat jenis sumber daya tersebut. Berikut ini adalah ringkasan dukungan sumber daya dalam program Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS).

a. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Program ATS di Mojokerto melibatkan 346 lembaga, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial, serta lembaga dan tokoh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Dinda selaku tim penanganan ATS bahwa,

“Keterlibatan dalam penanganan ATS berjumlah 346 institusi atau lembaga Mas, diantaranya Bappeda, Dinas Pendidikan, Kementrian Agama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Baznas, 18 Kecamatan, 304 Desa/Kelurahan dan SKB serta 17 PKBM.” (Wawancara pada tanggal 21 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB)

Koordinasi juga dilakukan bersama UNICEF untuk menyelaraskan pelaksanaan program. Untuk melaksanakan bentuk kerjasama dengan beberapa pihak tentu dibutuhkan koordinasi yang baik melalui pertemuan dengan UNICEF. Berikut dokumentasi pertemuan para pemangku kepentingan bersama UNICEF untuk menyelaraskan program P-ATS.

Gambar 2. Pertemuan Pemangku Kepentingan bersama UNICEF



Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2025

Ketersediaan SDM yang kompeten sangat menentukan keberhasilan program. Di Desa Sidoharjo, implementasi program berjalan baik dengan dukungan penuh dari seluruh pihak terkait.

b. Dukungan Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial penting untuk mendukung kelancaran program ATS. Proses anggaran yang dikeluarkan berdasarkan visi dan misi Presiden, Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati melalui renstra (rencana 5 (lima) tahun) dan lebih spesifiknya berupa renja (rencana kerja setiap tahun). Seperti yang disampaikan Ibu Liswati selaku tim penanganan P-ATS bahwa,

“Untuk proses anggaran di Pemerintah awalnya visi misi Presiden, Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Mas. Kemudian, melalui renstra atau disebut renja untuk tiap tahunnya. Dari Dinas Pendidikan, terkait anggaran yang mengurus tim anggaran misalnya kesetaraan anggaran sekian meliputi dana BOS dan BUP Kesetaraan, anggaran ATS sekian, semuanya akan diplotting dan dibutuhkan yang paling urgent.” (Wawancara pada tanggal 5 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB)

Pendanaan berasal dari dana BOS, BUP Kesetaraan, dan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk kebutuhan seperti seragam dan buku. Berikut merupakan rincian tabel anggaran tahun 2023-2024,

Tabel 3. Anggaran bantuan P-ATS Tahun 2023-2024

Tahun 2023			
Paket	Jumlah Anak	Bantuan PIP (Program Indonesia Pintar)	Bantuan Kain Batik Seragam
Paket A	1 Anak	Rp. 450.000	100 pcs
Paket B	12 Anak	Rp. 7.125.000	300 pcs
Paket C	45 Anak	Rp. 41.500.000	950 pcs
Tahun 2024			
Paket A	1 Anak	Rp. 225.000	75 buku
Paket B	12 Anak	Rp. 7.500.000	410 buku
Paket C	45 Anak	Rp. 29.700.000	1345 buku

Sumber : Diolah dari Data P-ATS, 2025

Anggaran disusun berdasarkan prioritas tahunan. Meski dana masih terbatas, program ATS di Desa Sidoharjo tetap berjalan sesuai standar, namun ke depan diperlukan perhatian lebih terhadap dukungan finansial.

c. Dukungan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana mendukung keberhasilan program ATS, seperti tempat belajar, fasilitas pendataan, dan teknologi. Bappeda Mojokerto mengembangkan aplikasi *Kerismojo* untuk memudahkan

verifikasi data anak tidak sekolah di tiap desa. Seperti yang disampaikan oleh Mas Candra selaku tim penanganan ATS bahwa,

“Bappeda mempunyai inovasi dalam pendataan p-ats, menggunakan aplikasi kerismojo, di dalam aplikasi tersebut terdapat data ats by name by address di seluruh kabupaten Mojokerto yang terbagi dalam per kecamatan, dalam aplikasi tersebut juga sudah dibuatkan username dan password sampai dengan tingkat desa, sehingga desa bisa memverifikasi dan validasi data nama-nama ats.” (Wawancara pada tanggal 21 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB).

Di Desa Sidoharjo, gedung pertemuan digunakan sebagai tempat belajar, dilengkapi meja, kursi, kipas angin, dan tentor. Berikut merupakan gambar gedung atau fasilitas penunjang pembelajaran ATS.

Gambar 3. Tempat Pembelajaran Siswa ATS Tampak Dalam



Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2025

Gedung pertemuan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan atau proses pembelajaran anak tidak sekolah Fasilitas pendataan mencakup administrasi dan formulir. Dukungan sarana prasarana cukup memadai, meskipun masih perlu evaluasi untuk penyempurnaan.

d. Dukungan Sumber Daya Waktu

Sumber daya waktu berkaitan erat dengan SDM dan berpengaruh pada proses pendataan, verifikasi, dan sosialisasi program P-ATS. Mas Candra selaku tim penanganan program P-ATS menyampaikan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan,

“Terdapat beberapa hambatan Mas dalam pelaksanaan yaitu sdm untuk verifikasi dan validasi desa terbatas, sosialisasi terbatas sehingga belum semua desa mengetahui P-ATS, dorongan dari orang tua juga masih kurang motivasi, anak penyandang disabilitas terbatas biaya sekolah, menikah di usia sekolah, tidak mau bersekolah dan kemampuan ekonomi orang tua sebagai penunjang biaya pendidikan.” (Wawancara pada tanggal 21 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB).

Hambatan muncul akibat terbatasnya SDM, minimnya sosialisasi, serta rendahnya motivasi orang tua dan kendala ekonomi. Meski demikian, pendataan dilakukan sistematis dengan melibatkan kelompok perempuan dan LKD. Di Desa Sidoharjo, koordinasi terus dilakukan meski masih ada kendala edukasi masyarakat. Evaluasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan waktu ke depan.

Dari keempat sumber daya kebijakan diatas, dapat dijelaskan bahwa program P-ATS menunjukkan pentingnya komitmen dari pemerintah untuk masyarakat terutama anak tidak sekolah karena dengan adanya dukungan dari pemerintah yang berempati, peduli, dan kreatif dalam pembelajaran anak tidak sekolah menjadi termotivasi dan antusias mengikuti program ATS. Dengan demikian, keberhasilan program P-ATS sangat bergantung pada kolaborasi antara berbagai pihak serta dukungan sumber daya yang memadai, baik dalam hal manusia, finansial, sarana prasarana, maupun waktu.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana sangat memengaruhi kelancaran implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa perilaku tegas pelaksana menjadi kunci keberhasilan program. Widodo (2021) menekankan bahwa struktur organisasi yang jelas dalam implementasi program kebijakan sangat penting untuk memastikan adanya koordinasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat.

Dalam program P-ATS, berbagai pemangku kepentingan terlibat sesuai tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari Bappeda, Dinas Pendidikan, Kemenag, hingga lembaga masyarakat dan desa. Keberhasilan program sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga. Bappeda bertanggung jawab atas perencanaan dan anggaran, Dinas Pendidikan dan Kemenag pada sektor pendidikan, serta dinas-dinas lainnya sesuai peran, seperti sosialisasi, pendampingan psikologis, publikasi, dan pendanaan tambahan dari Baznas. SKB dan 17 PKBM berperan dalam pendidikan Kejar Paket A/B/C. Para tutor PKBM adalah guru berpengalaman bergelar S.Pd dengan pengajaran sesuai standar. Berikut merupakan dokumentasi aparat desa dalam kunjungan ke rumah anak tidak sekolah untuk sosialisasi khusus terkait program ATS.

Gambar 4. Kunjungan Aparat Desa ke Rumah Anak Tidak Sekolah



Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2025

Penugasan pelaksana disesuaikan dengan tupoksi masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Choirul selaku Sekretaris Desa Sidoharjo bahwa,

“Dengan adanya program P-ATS ini menjadi hal yang positif bagi anak yang tidak mau melanjutkan sekolah karena beberapa alasan, Respon aparat desa sangat baik Mas, mungkin yang masih bingung ya terkait keberlanjutan program ini, karena juga kan dananya juga minim maka koordinasi lintas sektor dan pemerintah harus lebih jelas Mas.” (Wawancara pada tanggal 13 Februari 2025 Pukul 09.00 WIB).

Meski mendapat respons positif dari masyarakat, tantangan seperti koordinasi lintas sektor dan keterbatasan dana masih perlu dibenahi. Para pelaksana program, seperti para tutor di PKBM, sudah menjalankan pembelajaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dengan jadwal fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Selain itu, pemilihan tutor di PKBM untuk siswa ATS adalah guru yang berpengalaman dan bergelar S.Pd, serta pengajaran yang diberikan mengikuti kompetensi yang telah ditentukan sehingga tidak perlu diragukan kualitas dan pengalamannya.

Namun, karakteristik agen pelaksana tak lepas dari perilaku dan tingkah laku selama program berjalan. seperti yang dikatakan oleh Wirangga, Red Tista dan Destiyara pada wawancara berikut,

“Karakteristik para pelaksana dalam mengimplementasikan program ini cukup baik Mas. Para aparat desa juga mendatangi rumah warga yang ada anak tidak sekolah untuk di beri arahan mengikuti program ini. Namun, masih terdapat kekurangan seperti belum ada kegiatan pelatihan, karena kan minat dan bakat setiap anak beda-beda jadi perlu adanya koordinasi dari setiap lintas sektor.” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2025 Pukul 19.00 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas, meskipun pelaksanaan program berjalan baik dan karakteristik para pelaksana sudah baik, terdapat kekurangan seperti belum ada praktek diluar kelas yang sesuai dengan bakat dan minat siswa sehingga kedepannya bisa dioptimalkan menjadi inovasi yang baik. Selain itu, fasilitas pembelajaran perlu diperhatikan lebih lanjut untuk menunjang kualitas pembelajaran program ATS.

Diposisi Implementator

Disposisi pelaksana program ATS menunjukkan sikap positif terhadap tujuan menciptakan generasi emas 2045. Komitmen kuat mereka tercermin dari semangat membantu anak-anak kembali ke pendidikan formal dan mendukung pemerataan pendidikan. Nugroho (2019) turut menjelaskan mengenai disposisi implementator yakni meliputi tiga aspek penting, yaitu respon terhadap kebijakan, kognisi, dan intensitas disposisi. Sikap yang positif dan komitmen yang tinggi dari agen pelaksana akan meningkatkan efektivitas dalam mengimplementasikan kebijakan. Disposisi yang mendukung kebijakan akan mendorong implementator untuk lebih proaktif, bekerja keras, dan berusaha mengatasi tantangan yang muncul selama pelaksanaan kebijakan.

Program P-ATS mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang menargetkan wajib belajar 13 tahun. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Dinda selaku tim penanganan anak tidak sekolah bahwa,

“Kabupaten Mojokerto sangat mendukung Program Penanganan Anak Tidak Sekolah Mas, karena untuk menyiapkan generasi emas di tahun 2045, generasi penerus yang berdaya saing serta menjalankan program pemerintah wajib belajar 13 tahun (Wawancara pada tanggal 21 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB).

Keberhasilan program dinilai dari respons pelaksana dan data penurunan anak tidak sekolah, yang juga menjadi acuan evaluasi dan pengembangan program. Hal ini juga disampaikan ketika rapat komitmen pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Perangkat Desa, berikut dokumentasi rapat tindak lanjut Program P-ATS.

Gambar 5. Rapat Tindak Lanjut Komitmen Program P-ATS dengan Perangkat Desa

Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2025

Meskipun ada tantangan seperti keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan, kepemimpinan yang baik tetap dibutuhkan agar program berjalan efektif. Desa Sidoharjo menjadi contoh sukses implementasi P-ATS, ditunjuk sebagai pilot project karena komitmen masyarakatnya. Komitmen akan program ATS tidak hanya diberatkan pada desa akan tetapi komitmen bersama antar perangkat daerah yang mempunyai kontribusi dengan ATS beserta anggarannya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Liswati selaku tim penanganan dari Dinas Pendidikan dalam wawancara terkait harapannya untuk program ATS sebagai berikut,

“Komitmen bersama antara perangkat daerah yang mempunyai kontribusi dengan ATS dan anggaran Mas. Dinas pendidikan terus berkontribusi karena ATS outputnya adalah kesetaraan dan yang lebih enak komunikasi dengan masyarakat adalah perangkat desa karena lebih dekat dengan warga. Diharapkan terus bekerjasama dengan baik antara pemerintah dan antar perangkat daerah yang sesuai dengan SK TIM P-ATS.” (Wawancara pada tanggal 5 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB)

Program ini dirasakan bermanfaat oleh warga, terutama anak-anak putus sekolah yang bisa melanjutkan pendidikan non-formal. Seperti yang dikatakan oleh Red Tista selaku anak tidak sekolah yang mengikuti program ATS yaitu,

“Sangat membantu Mas program ini, dapat meningkatkan kemampuan saya dan mensupport saya dalam mengikuti program. Manfaatnya juga saya ada sesuatu yang ingin saya kejar yaitu ijazah.” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2025 Pukul 19.00 WIB)

Hal lain juga disampaikan oleh Ibu Ernawati selaku orang tua dari Wirangga berikut ini,

“Sangat mempengaruhi dengan baik mas program ATS ini, menjadikan anak saya pintar untuk membagi waktu dan semangat dalam melakukan kegiatan.” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2025 Pukul 19.00 WIB).

Dari wawancara di atas, orang tua dari anak yang mengikuti program menyampaikan pendapatnya mengenai dampak dan manfaat yang dirasakan oleh orang tua dengan adanya program ATS yaitu, program ATS dapat mempengaruhi anak untuk selalu melakukan hal positif dan dapat memberikan ijazah untuk anak yang mampu menyelesaikan program sehingga anak bersemangat membagi waktu belajarnya serta harapan untuk program ATS kedepannya bisa lebih baik lagi.

Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi, baik secara langsung maupun melalui media teknologi, sangat penting dalam menyampaikan informasi kebijakan agar dipahami semua pihak. Menurut Newstrom (2007), komunikasi yang efektif memperkuat koordinasi, memperjelas tujuan, dan mengatasi hambatan implementasi. Keberhasilan Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) di Mojokerto sangat bergantung pada komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, orang tua, dan lembaga pendidikan. Selain peranan, Ibu Liswati juga menyampaikan komunikasi yang dilakukan turut mengundang beberapa pihak antara lain,

“Pada tahun 2024, Dinas Pendidikan mengundang semua desa Mas, seperti Kasi, Kemas Kecamatan untuk melihat data, kendala dan pemetaan untuk kesetaraan, nah nantinya akan kami beri saran dan masukan. Kami juga komunikasi dengan Bappeda, Cabdin untuk bekerjasama mengenai komitmen, melakukan FGD terkait langkah-langkah penurunan ATS berupa inovasi.” (Wawancara pada tanggal 5 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB)

Dari wawancara di atas Ibu Liswati menyampaikan upaya Dinas Pendidikan dalam hal komunikasi mengundang semua desa. Berikut merupakan dokumentasi rapat sosialisasi penanganan ATS yang dihadiri oleh para pelaksana program.

Gambar 6. Rapat Sosialisasi Penanganan ATS oleh Para Pelaksana Program

Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2025

Pada gambar 6 diketahui bahwa rapat sosialisasi penanganan ATS dihadiri oleh para pelaksana program dan dipimpin oleh UNICEF. Sosialisasi kepada masyarakat desa dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan nama sasaran program (Sasmito dan Nawangsari, 2020). Dalam rapat tersebut menjadi wadah untuk menyatukan pemahaman, meskipun tantangan tetap ada, seperti rendahnya prioritas program, pergantian staf, dan keterbatasan anggaran.

Sosialisasi bersama UNICEF dan instansi lain. Pelatihan penggunaan aplikasi SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat) bagi pendata dan praktek pendataan di Desa selama 2 hari di bulan Januari 2023 dan turut mendukung pendataan di desa. Pihak yang mengikuti pelatihan adalah pemerintah terkait dan masyarakat yang terlibat dalam tim penanganan ATS di Desa. Selanjutnya para pelaksana menggalakkan sosialisasi tersebut kepada masyarakat Desa. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Endro selaku Kaur Keuangan desa Sidoharjo bahwa,

“Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah desa Sidoharjo adalah dengan memberikan informasi kepada setiap RT dan RW yang ada di wilayah desa Sidoharjo dengan adanya program P-ATS ini sehingga apabila ada warga yang memang memerlukan program tersebut bisa mendaftarkan diri langsung ke Balai Desa ataupun lewat RT/RW.” (Wawancara pada tanggal 13 Februari 2025 Pukul 09.00 WIB)

Dari wawancara tersebut Ibu Endro selaku Kaur Keuangan desa Sidoharjo menjelaskan komunikasi yang dilakukan Pemerintah dengan masyarakat Desa. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mendapat perhatian dari masyarakat salah satunya merubah pola pikir masyarakat akan program ATS, tanggapan dari masyarakat disampaikan oleh anak tidak sekolah dan orang tua. Berikut tanggapan dari Red Tista selaku anak tidak sekolah yang mengikuti sosialisasi bahwa,

“Sosialisasi yang diberikan dapat memahami peran pemerintah dalam program ATS dan cukup suka dengan sosialisasinya karena tidak ada paksaan dari pihak guru.” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2025 Pukul 19.00 WIB).

Dari tanggapan anak tidak sekolah di atas dapat diketahui bahwa anak tidak sekolah merespon dengan baik sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Respons anak dan orang tua cukup positif karena program ini memberi harapan untuk kembali bersekolah dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Implementasi program dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik. Van Meter Van Horn mengatakan bahwa ketersediaan sumberdaya ekonomi menjadi elemen yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan, perhatian terhadap kondisi sosial juga sangat diperlukan karena masyarakat sebagai kelompok sasaran, dan faktor politik sebagai jembatan untuk memperhatikan penyusunan kebijakan. Menurut Ghazali et al. (2020), kondisi ekonomi menentukan ketersediaan anggaran. Faktor sosial, seperti kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, juga turut menentukan. Selain itu, faktor politik seperti stabilitas pemerintahan, dukungan kebijakan, dan koordinasi antar lembaga memengaruhi proses pengambilan keputusan. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan penting untuk memastikan program diterima dan berjalan efektif.

a. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi di Kabupaten Mojokerto, meskipun relatif stabil dengan sebagian besar masyarakat berada dalam kategori menengah ke atas, tetap menghadapi tantangan, terutama di daerah pedesaan. Ibu Liswati turut menyampaikan terkait kondisi ekonomi, sosial maupun politik dari program P-ATS bahwa,

“Melihat dari kondisi ekonomi di Kabupaten Mojokerto, untuk UMRnya sebenarnya tinggi Mas, bisa dilihat dari kendaraan yang dimiliki, kestabilan perekonomian masyarakat Mojokerto

kategori menengah ke atas. Lalu untuk kemiskinan dan pendidikan sudah ada Program Indonesia Pintar (PIP) dan sudah tersalurkan dengan baik serta tepat sasaran Mas.” (Wawancara pada tanggal 5 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB).

Masyarakat dengan ekonomi terbatas seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk biaya pendidikan. Ini mengakibatkan anak-anak dari keluarga kurang mampu menjadi lebih rentan untuk putus sekolah. Sebagai langkah untuk mengatasi hal ini, program-program seperti Indonesia Pintar (PIP) telah membantu dalam memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin.

b. Kondisi Sosial

Dari segi sosial, banyak anak yang usianya sudah wajib belajar namun tidak bersekolah karena berbagai faktor, seperti perundungan dan disabilitas. Seperti yang disampaikan Ibu Liswati turut menyampaikan terkait kondisi sosial dari program P-ATS bahwa,

“Kondisi sosial Kabupaten Mojokerto dengan ATS sangat berpengaruh, kebanyakan anak yang usia wajib belajar tapi tidak sekolah punya keinginan sekolah Mas biasanya karena faktor dibully, disabilitas juga. Nah mungkin kedepannya perlu ada kebijakan tentang perlindungan anak disabilitas.” (Wawancara pada tanggal 5 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB).

Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk kebijakan yang lebih inklusif, terutama yang melindungi anak-anak dengan disabilitas. Selain itu, di desa Sidoharjo, kondisi sosial yang lebih stabil dan pola pikir masyarakat yang semakin terbuka mendukung keberhasilan program P-ATS. Bapak Choirul menyampaikan secara spesifik sosial dan pada desa Sidoharjo sebagai berikut,

“Kalo kondisi sosial itu nantinya akan berpengaruh kedepannya Mas. Karena bakal ada ketimpangan dan juga pola pemikiran nantinya bakal jauh Mas.” (Wawancara pada tanggal 13 Februari 2025 Pukul 09.00 WIB).

c. Kondisi Politik

Dari sisi politik, program P-ATS tidak memiliki kaitan langsung dengan politik, namun kebijakan yang mendukung program ini akan memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan negara. Seperti yang disampaikan Ibu Liswati turut menyampaikan terkait kondisi politik dari program P-ATS bahwa,

“Untuk kondisi politik, ATS murni tidak ada kaitan dengan politik Mas, secara garis besar tujuannya untuk mengentaskan pendidikan yang buruk dan butuh orang tulus untuk menangani ATS ini tetapi nantinya kedepannya pasti ada kaitannya dengan politik karena kebijakan program yang terlaksana dengan baik akan berdampak pada pertumbuhan Negara yang baik pula.” (Wawancara pada tanggal 5 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB).

Keberhasilan dalam implementasi program P-ATS dapat menjadi indikator dalam upaya Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai status negara berkembang yang lebih maju. Namun, keberhasilan program ATS akan menjadi patokan Indonesia untuk menjadi Negara yang berkembang dan mengalami pertumbuhan yang baik.

Selain melihat kondisi ekonomi, sosial dan politik, salah satu faktor penting dalam keberhasilan program ini adalah antusiasme yang tinggi dari masyarakat, baik dari anak-anak yang terlibat dalam program maupun orang tua mereka. Program ini memberikan kesempatan kedua untuk memperoleh pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh Destiyara selaku anak tidak sekolah yang mengikuti program ATS bahwa,

“Kegiatan penanganan anak tidak sekolah bertujuan untuk mengembalikan anak mau bersekolah lagi dan saya juga sangat antusias untuk bisa sekolah lagi berkat program ini.” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2025 Pukul 19.00 WIB).

Dalam wawancara dengan anak tidak sekolah mengenai antusiasnya mengikuti program ATS dapat diketahui bahwa program ATS memberikan pandangan positif terhadap program dan pentingnya pendidikan bagi diri sendiri. Berikut dokumentasi anak tidak sekolah ketika mengikuti ujian.

“Saya sangat mendukung program ATS ini Mas, program ini dapat membantu anak-anak putus sekolah untuk kembali bersekolah dan mencapai tujuan pendidikan mereka. Semoga kedepannya program ATS dapat diikuti oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan.” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2025 Pukul 19.00 WIB).

Dari wawancara yang disampaikan oleh orang tua anak tidak sekolah mengenai antusiasnya dalam program ATS dapat diketahui bahwa program ATS diterima dengan baik oleh masyarakat dan para orang tua sangat mendukung program ATS karena anak-anak dapat bersekolah kembali Selain itu, harapan orang tua untuk program ATS dapat terus berlanjut dan merata untuk anak-anak yang membutuhkan program ATS dan Indonesia dapat menjadi Negara dengan kualitas pendidikan yang lebih baik.

SIMPULAN

Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) “Ayo Sekolah Rek” merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mendukung wajib belajar 12 tahun, pencapaian SDGs, dan visi Indonesia Emas 2045. Program ini bertujuan mengembalikan anak putus sekolah ke bangku pendidikan demi meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan kualitas hidup mereka.

Berdasarkan variabel pengukuran keberhasilan implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dengan enam variabel, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, Karakteristik agen pelaksana, sikap/ kecenderungan agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Implementasi program Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) di Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto dapat dikatakan berjalan cukup baik, walaupun masih terdapat sedikit kekurangan dan juga keterbatasan yang menjadi hambatan.

Pada variabel standar dan tujuan kebijakan, implementasi Program P-ATS di Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, bertujuan menyesuaikan data anak putus sekolah tahun 2020 dengan kondisi nyata di lapangan. Program ini berhasil mendorong anak-anak kembali bersekolah, baik secara formal maupun non-formal, sehingga angka ATS menurun pada 2023. Meski dinilai efektif, evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan untuk mendukung tercapainya generasi emas Indonesia 2045.

Pada variabel sumber daya kebijakan, implementasi Program P-ATS di Desa Sidoharjo berjalan cukup baik, ditunjukkan melalui koordinasi cepat dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan pembentukan tim pelaksana sesuai SOP. Pendanaan awal berasal dari UNICEF, kemudian dilanjutkan dengan APBD dan PIP, meski alokasi anggaran masih terbatas. Fasilitas pembelajaran non-formal tersedia, namun belum memadai, seperti kurangnya papan tulis. Selain itu, durasi pembelajaran hanya satu jam membuat proses belajar kurang efektif, meskipun harapan orang tua terhadap peningkatan kualitas hidup anak melalui program ini cukup tinggi.

Pada variabel karakteristik agen pelaksana, implementasi Program P-ATS di Desa Sidoharjo menunjukkan tekad kuat dari Pemkab Mojokerto, tim pelaksana, Dinas Pendidikan, DPMD, 304 desa/kelurahan, SKB, dan PKBM dalam menurunkan angka anak putus sekolah. Setiap lembaga menjalankan perannya sesuai tupoksi tanpa tumpang tindih. Namun, masih ada masyarakat yang kurang teredukasi tentang program ini, sehingga diperlukan sosialisasi lebih lanjut.

Pada variabel komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, Implementasi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) di Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Komunikasi yang terjalin antara pelaksana dan juga lembaga-lembaga terkait ditemukan hambatan, dimana pemerintah perlu meningkatkan prioritas terhadap program yang dijalankan meskipun anggaran yang disalurkan masih minim. Selain itu, peran aktif masyarakat dalam komunikasi, dukungan dan juga tindakan sangat penting keberhasilan program, terutama pada hal fasilitas yang memadai dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Kerjasama yang baik antara pemerintah, desa dan masyarakat harus tetap terjaga. Terakhir terkait pada tahapan transparansi untuk dilakukan evaluasi serta perbaikan yang berkelanjutan, agar program berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Pada variabel sikap pelaksana, implementasi Program P-ATS di Desa Sidoharjo mendapat dukungan dari berbagai pihak karena dinilai efektif mengurangi angka anak putus sekolah dan mendukung tercapainya generasi emas 2045. Sebagian orang tua sudah mendukung, namun sebagian lain masih perlu diedukasi. Meski berjalan baik, program ini belum menjadi prioritas dibanding isu seperti stunting dan kemiskinan.

Pada variabel lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, implementasi Program P-ATS di Desa Sidoharjo berjalan cukup baik. Kendala ekonomi muncul karena minimnya anggaran, namun program ini tetap membantu anak dari keluarga kurang mampu untuk bersekolah kembali. Secara sosial, hambatan muncul dari budaya pernikahan dini, sehingga diperlukan edukasi untuk mengubah pola pikir masyarakat. Di bidang politik, tidak ada hambatan karena pemerintah menjalankan program sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 tentang hak atas pendidikan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) di Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, peneliti dapat memberikan untuk memperbaiki dan memperlancar terhadap pelaksanaan program penanganan anak tidak sekolah di desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, diantaranya sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Kabupaten Mojokerto diharapkan perlu untuk memperhatikan kembali terkait dengan anggaran bagi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS), karena terbatasnya anggaran dapat mempengaruhi keberlanjutan program sehingga akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat.

- (2) Diharapkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) perlu untuk menambahkan kegiatan praktek pembelajaran luar kelas dengan harapan dapat adaptasi dengan teknologi yang semakin berkembang, bukan hanya menjalani sekolah tapi mendapatkan wawasan baru supaya ketika anak putus sekolah lulus dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
- (3) Diharapkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto bersama pemerintah desa diharapkan memperhatikan kembali terkait fasilitas selama proses pembelajaran seperti penambahan modul pembelajaran, papan tulis dan juga terkait penambahan jam pembelajaran, karena pembelajaran bagi anak putus sekolah berbeda dengan dengan sekolah formal, sehingga mempengaruhi terhadap ke optimalan pembelajaran.
- (4) Diharapkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto bersama pemerintah desa menekankan kembali terkait sosialisasi secara interaktif serta memberikan motivasi kepada anak putus sekolah dengan mendatangi rumah orang tua siswa untuk mengedukasi terkait pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Sehingga dapat merubah pola pikir dan juga kegigihan anak untuk mau kembali bersekolah sehingga kedepannya dapat merubah kualitas hidup yang lebih baik
- (5) Diharapkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto perlu adanya menambahkan informasi dalam sosialisasi kepada pemerintah desa serta masyarakat terkait dengan prioritas program penanganan anak tidak sekolah dapat memberikan dampak positif bagi sekitar, seperti keberhasilan program penanganan anak tidak sekolah dalam upaya untuk mengurangi pernikahan dini, pengangguran. Sehingga keberlanjutan kebijakan program bagi penanganan anak tidak sekolah perlu untuk menjadi prioritas.

REFERENSI

- Assa Riswan. 2022. Jurnal Ilmiah Society, Faktor Anak Putus Sekolah : Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2(1), 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/37564>
- Edward, George C. 2020. Teori Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Empat. Eprints.Uny.Ac.Id. https://www.researchgate.net/profile/Rulinawaty-Kasmad/publication/327762798_Implementasi_Kebijakan_Publik/links/5ba2fda292851ca9ed1748e1/Implementasi-Kebijakan-Publik.pdf
- Ghazali, A., Dkk. 2022. Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, And Governance (Esg) Terhadap Kinerja Perusahaan. <https://prosiding-old.pnj.ac.id/index.php/snampnj/article/download/5533/2560>
- Hamdani, A. D., Nurhafsa, N., & Silvia, S. 2022. Inovasi Pendidikan Karakter Dalam Menciptakan Generasi Emas 2045. Jpg: Jurnal Pendidikan Guru, 3(3), 170. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/jpg/article/download/7291/3738>
- Hoogerwert, A. 2021. Pengaruh Keuangan Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah. Jurnal Kebijakan Publik. Repository.Uinfasbengkulu.Ac.Id. (Online)
- Kasmad, R., & Terbuka, U. 2018. Implementasi Kebijakan Publik: Teori Van Meter Van Horn. https://www.researchgate.net/publication/327762798_Implementasi_Kebijakan_Publik
- Magfirah, D. A. 2019. The Determinant Factors Of Drop Out Students At High School/Vocational School Level In Mataram City. Jurnal Kebijakan Pendidikan, 8(3), 215–222. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jmsk/article/view/36043>
- Miles dan Huberman. 1992. Teknik Analisis Data. (Online).
- Newstrom, J. W. 2007. Organizational Behavior: Human Behavior At Work. Mcgraw-Hill. https://www.homeworkforyou.com/static_media/uploadedfiles/1644962096_7651377_918.pdf
- Nugroho, R. 2019. Disposisi Implementator Dalam Implementasi Kebijakan Publik. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 23(1), 45-60. https://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-....pdf
- PERBUP Kab. Mojokerto. Nomor 188.45/ 422/HK/416-012/ 2023 tentang Rencana aksi daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/147205/perbup-kab-mojokerto-no-18-tahun-2019>
- Purwatiningsih, A., & Suprojo, A. 2024. Implementasi Kebijakan Uu No . 20 Tahun 2003 Dalam Menangani Anak Putus Sekolah Di Kota Malang. 14(20), 1–15. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/4784>
- Ridwan, A., Sholihah, Q., & Wike, W. 2022. Implementasi Program Campus Social Responsibility (Csr) Pada Masa Pandemi Covid-19 : Studi Pendampingan Anak Rentan Putus Sekolah Di Kota Surabaya. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 008(01), 23–34. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/189908/>
- Sasmito, C., & Nawangsari, E.R. 2020. Pelaksanaan Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera di Wilayah Kota Batu. *Journal of Public Sector Innovations*, Vol 4, No.2, (55-58).

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. (Online).

Taufik, Achmad Nur & Rahaju, Tjitjik. 2021. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Untuk Mewujudkan Kesenjangan Belajar bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Tingkat SMA di Surabaya. Publika. Vol.9, No.3, 139-154.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/39477/34488>

UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1. Pendidikan Yang Layak. (Online).

Widodo, S. 2019. Pentingnya Infrastruktur Dalam Implementasi Kebijakan Publik. Jurnal Administrasi Publik. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/download/8344/pdf>.

Widodo, S. 2021. Pentingnya Struktur Organisasi Dalam Implementasi Kebijakan Publik. Jurnal Administrasi Publik. https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/02/implementasi_kebijakan_publik_t.pdf.